

## TANDATANGANI NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

# Kejari Beri Pendampingan Hukum Pemkab Sleman

**SLEMAN (KR)** - Pemkab Sleman menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sleman tentang Sinergi Kerja Sama Bidang Hukum. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dilakukan Bupati Kustini Sri Purnomo dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Widagdo di Pendapa Parasamya Pemkab Sleman, Kamis (7/4).

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Danang Maharsa, Sekretaris Daerah Harda Kiswaya, dan segenap pejabat dari Pemkab Sleman dan Kejari Sleman.

Bupati memberikan apresiasi atas kerja sama yang baik antara Pemkab Sleman dan Kejari Sleman selama ini.

Sebagai aparaturnya pemerintah, setiap ketugasan yang dilakukan tidak terlepas dari hukum yang berlaku. sehingga

penting untuk memiliki pengetahuan tentang aspek implementasi dan konsekuensi ketentuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas pengelola pemerintah dalam hal ini Pemkab Sleman.

"Sampai saat ini, antara Pemkab dan Kejaksaan sudah bekerjasama dengan baik. Karena penting bagi kami untuk mendapatkan pendampingan, terutama tentang implementasi ketentuan hukum dan konsekuensinya," ujarnya.

Bupati juga berharap dengan ditandatanganinya nota kesepakatan bersama dengan Kejari Sleman ini dapat memberikan layanan bantuan hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Pemkab Sleman.

"Saya menaruh harapan besar bahwa melalui kesepakatan bersama ini dapat memberikan layanan bantuan hukum dan pendapat hukum. Lebih jauh kami juga berharap kemitraan ini dapat memberikan dukung-



Bupati didampingi Kejari Sleman menandatangani nota kesepakatan.

an bagi perangkat daerah untuk melaksanakan tupoksinya dengan optimal," ujarnya.

Sementara Kajari Widagdo juga berharap dengan ditandatanganinya nota kesepakatan bersama ini dapat meningkatkan sinergitas dan optimalisasi kedua belah pihak.

"Saya berharap semoga kemitraan yang sudah berjalan baik selama ini dapat bermanfaat serta meningkatkan sinergitas dan optimalisasi antarkedua belah pihak. Juga diharapkan dapat menghasilkan pencapaian sesuai dengan tujuan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sleman," tandasnya. (Has)-f

## WABUP DANANG BERI APRESIASI 20 Pertashop Ajukan Izin Pendirian

**SLEMAN (KR)** - Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebut, pendirian pertashop banyak diminati oleh masyarakat di Kabupaten Sleman. Saat ini saja ada sebanyak 20 pengajuan pendirian pertashop oleh beberapa kalurahan. Sedangkan yang sudah beroperasi ada sebanyak 6 pertashop.

"Kami mengapresiasi pendirian pertashop yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan. Diharapkan pertashop tersebut nantinya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kalurahan, sehingga masyarakatnya bisa lebih berdaya," ungkap Danang kepada KR di Sleman, Kamis (7/4).

Terkait banyaknya pendirian pertashop ini, Danang mengajak seluruh masyarakat untuk selalu membeli bahan bakar di pertashop milik BUMDes. "Mari optimalkan dan

manfaatkan pertashop ini. Kalau membeli bensin tidak perlu jauh-jauh. Karena kualitasnya, takarannya dan lain sebagainya juga sama dengan SPBU-SPBU lainnya," ujarnya.



Wabup Danang Maharsa mengisikani BBM dari pertashop di Purwobinangun.

Sebelumnya, Danang telah meresmikan pertashop di Purwobinangun Pakem Sleman. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mini dengan kode 4P.55513 tersebut merupakan BUMDes milik Kalurahan Purwobinangun. "Masyarakat Purwobinangun harus bersyukur karena bisa mendirikan pertashop di tempat yang strategis, dan jaraknya dengan SPBU cukup jauh," tambahnya.

Sementara Lurah Purwobinangun Heri Suasana menerangkan, pertashop tersebut telah beroperasi selama dua bulan sebelum diresmikan. Penghasilan perhariannya juga terus mengalami kenaikan (Has)-f

## PENGAWASAN TEMPAT USAHA SELAMA RAMADAN Petugas Temukan Penjualan Minuman Beralkohol

**SLEMAN (KR)** - Selama Ramadan, Pemkab Sleman melakukan pembinaan dan pengawasan tempat usaha.

Kegiatan tersebut mengacu pada Perbup Sleman No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Umum, Rumah Makan, Restoran dan Hotel pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri dan Surat Edaran Bupati No. 015 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan Umum pada Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H di Kabupaten Sleman.

Rabu (6/4) malam, kegiatan pembinaan dan pengawasan dipimpin oleh Kabid Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Sleman Sri Madu Rak-

di Sepreken Kitchen & Bar Jalan Magelang Km 3,2 Kutu Tegal Sinduadi Mlati, Sugar Karaoke Jalan Palagan Tentara Pelajar No 106 Sumberan Sariharjo Ngaglik, dan Habitat Cafe Jalan Palagan Tentara Pelajar No 2-33 Karangmloko Sariharjo Ngaglik.

"Hasilnya terdapat indikasi pelanggaran, yakni ditemukan minuman beralkohol di dalam gelas di meja pengunjung dan masih operasional di luar ketentuan SE Bupati," jelasnya. (Has)-f

Menjumpai hal tersebut, tim memberikan saran atau masukan untuk ditindaklanjuti dengan tidak menyediakan/menjual minuman beralkohol saat Ramadan.

"Kami juga minta pada pelaku usaha untuk menepati SE Bupati yang telah diterbitkan agar pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan dapat dilaksanakan dengan khidmat dan tercipta suasana yang aman dan damai di wilayah Kabupaten Sleman," tambah Sri Madu. (Has)-f



Tim gabungan menemukan penjualan minuman beralkohol.

## Dewan Dorong PTM 100 Persen Kembali Digelar

**SLEMAN (KR)** - DPRD Kabupaten Sleman mendorong kepada pemerintah daerah untuk kembali menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen. Mengingat sekarang ini Covid-19 sudah mulai melandai.

Anggota DPRD Kabupaten Sleman Suryana AmDKes mengatakan, saat ini Kabupaten Sleman sudah masuk dalam level 3. Diharapkan penanganan dan penyebaran Covid-19 kembali terkendali. "Semo-

ga level PPKM di Sleman kembali menurun menjadi level 2. Soalnya penularan Covid-19 di Sleman sudah menurun," katanya di Sleman, Kamis (7/4).

Dengan kondisi yang sudah stabil ini, Suryana mendorong kepada pemerintah daerah untuk segera kembali menerapkan PTM 100 persen. Tujuannya supaya pembelajaran kembali optimal. "Kalau pembelajaran masih 50 persen, kami menilai belum optimal. Makanya kami men-

dorong PTM 100 persen kembali dilaksanakan," ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan PTM 100 persen yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan menjadi bahan evaluasi agar Covid-19 tidak kembali melonjak. "Pengalaman menerapkan PTM 100 persen bisa jadi acuan sekolah. Khususnya dalam pelaksanaan protokol kesehatan harus diperhatikan. Supaya PTM 100 persen tidak menjadi kluster penularan," tegas Suryana. (Sni)-f

**DPRD KABUPATEN SLEMAN**  
**SUARA WAKIL RAKYAT**  
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274) 868413, Fax (0274) 868413

## KINERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN SLEMAN

# Layanan Dukupil Jadi Barometer Layanan Publik

**SLEMAN (KR)** - Penyelenggaraan layanan publik kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur menjadi harapan seluruh warga Sleman.

Baik buruk jalannya pelayanan publik, barometernya adalah bab administrasi kependudukan. Baik dari akta kelahiran, akta kematian, e-KTP, KK, akta pernikahan dan sebagainya.

Sekretaris Komisi A DPRD Sleman Sumaryatin, mendorong Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukupil) Sleman yang mempunyai kewenangan sebagai pelaksana teknis daerah di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya pada masyarakat.

Tidak boleh ada kesulitan warga Sleman dalam mengurus dokumen kependudukannya.

"Layanan dukupil menjadi barometer pelayanan publik. Idealnya mengurus administrasi kependudukan (adminduk) bisa cepat, dekat dan mudah serta anti ribet," kata Sumaryatin atau yang kerap disapa Atin ini, Kamis (7/4).

Hadimya layanan online dan Anjungan Dukupil Mandiri (ADM) di 8 lokasi yang ada sekarang harus dibarengi sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.

Mengingat keberagaman masyarakat dalam pemahaman teknologi, yang tentunya belum secara merata penggunaan teknologi dan sejenaknya.

"Sosialisasi ini penting agar ADM di 8 lokasi optimal dalam penggunaannya. Jangan sampai ada alatnya, ada teknologinya dimana-mana tapi penggunaannya tidak optimal. Sosialisasi ini tentu bisa



Sumaryatin

dilakukan dengan berbagai kanal informasi yang ada. Baik online maupun offline," pintanya.

Lebih lanjut dikatakan Atin, transformasi digital yang sudah didukung anggaran jangan sampai tidak maksimal karena sosialisasi yang kurang. Di samping sosialisasi juga maintenance alat, sehingga tidak ada alat yang terjadi tidak berfungsi terlalu lama.

"Selain daya dukung anggaran, maintenance

alat, untuk transformasi digital juga dibutuhkan SDM yang terus ditingkatkan kemampuannya untuk mendukung sistem yang serba cepat tetapi juga harus tepat, karena menyangkut data data kependudukan. SDM terampil yang mengoperasikan teknologi dengan lebih baik. Sehingga masyarakat bisa menikmati layanan dukupil dengan mudah, dekat, cepat dan tepat," ucap politisi dari Fraksi PKS ini.

Atin berharap, seluruh urusan ketatalaksanaan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan dengan lebih baik.

Sehingga citra Pemerintah Kabupaten Sleman akan semakin bagus dan masyarakat akan semakin terlayani dengan baik.

"Masyarakat itu happy dan tidak muluk-muluk asal pelayanan kependudukan bagus dan prima sudah dia acung jem-

polkan kepada pemerintah," ujar anggota dewan dari Dapil 3 Sleman ini.

Mungkinkah ADM sampai Kalurahan?. Untuk kalurahan-kalurahan dengan jumlah penduduk besar seperti Purwomartani, sudah selayaknya ADM sampai di kalurahan.

Sehingga kecepatan dan kedekatan dengan penduduk membuat ADM memiliki fungsi yang optimal.

"Dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa, tentu eksekutif perlu menghitung berapa ADM yang dibutuhkan. Baik itu ditempatkan di kapanewon, kalurahan yang jumlah penduduknya besar maupun tempat publik seperti pusat perbelanjaan. Sehingga nantinya masyarakat dengan mudah mengakses adminduk secara cepat dan dekat," pungkas Atin. (Sni)-f



Komisi A monitoring di Kapanewon Gamping.



Komisi A menerima audiensi dari masyarakat Sleman.